

Ketimpangan pendapatan antarwilayah di Jawa Timur: Peran pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, dan upah minimum

Ariyani Nurul Fadilah*, Marseto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: 22011010021@student.upnjatim.ac.id)

Abstract

Income inequality between regions in East Java Province remains an obstacle to equitable development even though economic growth continues to increase, indicating that economic progress is not evenly distributed across the region. The present study examined the extent to which economic growth, regional fiscal expenditure, the Human Development Index, and district-level minimum wages influence income inequality across regencies and municipalities in East Java Province. Income inequality was measured using the Williamson Index. The study employed a quantitative approach with a panel data regression method based on balanced panel data covering 38 districts and cities during the 2020–2024 period, resulting in 190 observations. Empirical results revealed that economic growth and minimum wage both exerted a statistically significant positive influence on income inequality. In contrast, greater allocation of regional fiscal expenditure and improvements in human development were found to serve as effective mechanisms in narrowing interregional income disparities within East Java Province.

Keywords: Income Inequality, Williamson Index, Economic Growth, Regional Expenditure, Human Development Index

Abstrak

Ketimpangan pendapatan antardaerah di Provinsi Jawa Timur masih menjadi hambatan pembangunan yang adil meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum merata di seluruh wilayah. Penelitian ini mengkaji sejauh mana pertumbuhan ekonomi, belanja fiskal daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum tingkat kabupaten memengaruhi ketimpangan pendapatan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel berdasarkan data panel seimbang yang mencakup 38 kabupaten dan kota selama periode 2020–2024, sehingga menghasilkan 190 observasi. Hasil empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sama-sama memberikan pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, alokasi belanja fiskal daerah yang lebih besar dan peningkatan pembangunan manusia ditemukan berperan sebagai mekanisme yang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Williamson, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia

How to cite: Fadilah, A. N., & Marseto, M. (2026). Ketimpangan pendapatan antarwilayah di Jawa Timur: Peran pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, dan upah minimum. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(2), 447–467. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i2.3107>



1. Pendahuluan

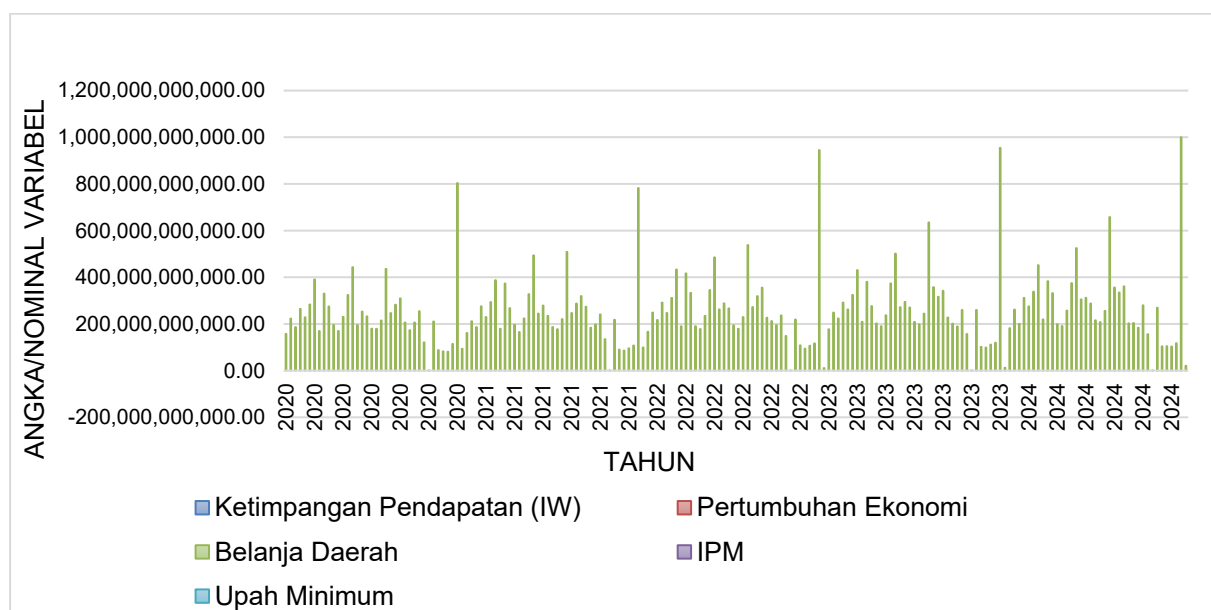
Pembangunan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas produksi serta perluasan kesempatan kerja yang lebih merata dan terbuka bagi semua kalangan. Cita-cita ini menjadi landasan utama berbagai kebijakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, arah dan tujuan tersebut tidak selalu tercermin dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, laju pertumbuhan yang tinggi tidak senantiasa diikuti oleh pembagian manfaat yang sebanding bagi seluruh kelompok maupun wilayah. Sebagian pihak memperoleh lonjakan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya, sehingga jurang kesenjangan pun kian melebar seiring berjalannya waktu. Pola semacam ini kerap muncul ketika buah pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau daerah yang memang sudah berada dalam posisi lebih diuntungkan. Kondisi inilah yang menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai salah satu dimensi penting dalam menilai mutu pembangunan secara menyeluruh. Ketimpangan tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Semakin besar kesenjangan yang terjadi, semakin jauh pula pembangunan dari tujuan sejatinya, yakni menciptakan kemakmuran yang merata dan berkeadilan (Asy'ariati et al., 2022).

Ketimpangan yang tinggi bukan sekadar persoalan statistik, melainkan juga cerminan dari ketidakseimbangan struktural yang dapat menghambat kemajuan sosial dalam jangka panjang. Maka dari itu, upaya untuk memahami dan mengatasi ketimpangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan yang berkelanjutan. Pada skala global, data dari World Inequality Database memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, di mana 10 persen kelompok terkaya di berbagai negara menguasai lebih dari 40 hingga 50 persen pendapatan nasional, bahkan melampaui angka 60 persen di beberapa negara (Chancel et al., 2026). Fakta ini menggambarkan bahwa konsentrasi pendapatan pada segelintir kelompok masih menjadi fenomena yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Indonesia pun menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda, yakni bertahannya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah yang hingga kini belum sepenuhnya mampu diatasi. Berbagai instrumen kebijakan yang tersedia, mulai dari program bantuan sosial hingga kebijakan fiskal, tampaknya belum cukup ampuh untuk meruntuhkan tembok pemisah antara kedua kelompok tersebut. Kesenjangan yang terus bertahan ini menjadi cerminan bahwa upaya pemerataan masih memerlukan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan menyeluruh (S. Dai et al., 2023).

Pada tingkat individu, disparitas pendapatan memberikan dampak yang langsung terasa terhadap kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tingginya kesenjangan pendapatan kerap diasosiasikan dengan berbagai persoalan sosial yang kompleks, seperti menurunnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, serta melemahnya kepercayaan sosial dan rasa keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat (Koponen & Kouvo, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berimplikasi luas terhadap kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.

Dalam kajian pembangunan regional, ketimpangan antardaerah dapat dikuantifikasi menggunakan Indeks Williamson, yakni suatu indikator yang mengkalkulasi kesenjangan PDRB per kapita antarwilayah dengan memperhitungkan jumlah penduduk di masing-masing daerah sebagai faktor pembobot (Aprilianti & Harken, 2021). Penerapan indikator ini pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menghasilkan gambaran tingkat kesenjangan yang cukup mencolok dan layak untuk dicermati lebih dalam. Angka-angka yang terukur menunjukkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah di provinsi ini bukanlah hal yang dapat dianggap ringan. Justru sebaliknya, kesenjangan tersebut mencerminkan adanya jurang yang cukup dalam antara wilayah yang telah berkembang pesat dan wilayah yang masih tertinggal. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai Indeks Williamson berada pada rentang 0,975 hingga 1,018 dengan rata-rata sebesar 1,011, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan akumulasi pendapatan per kapita masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu dan belum terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.



Gambar 1. Tren Keseluruhan Variabel Penelitian Tahun 2020–2024

Berdasarkan grafik gabungan variabel penelitian selama periode 2020–2024, terlihat bahwa setiap variabel memiliki pola perkembangan yang berbeda. Belanja daerah tampak paling dominan secara visual karena menggunakan satuan rupiah dengan nilai nominal yang jauh lebih besar dibandingkan variabel lain. Sementara itu, upah minimum dan IPM menunjukkan kecenderungan meningkat lebih stabil, sedangkan pertumbuhan ekonomi bergerak lebih fluktuatif akibat tekanan pandemi pada awal periode penelitian. Perbedaan satuan dan skala pengukuran antarvariabel menyebabkan sebagian variabel tampak kurang menonjol dalam grafik, sehingga visualisasi ini lebih digunakan untuk melihat kecenderungan umum, sedangkan hubungan antarvariabel dianalisis lebih lanjut melalui regresi data panel.

Pertumbuhan ekonomi lazimnya dijadikan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, namun sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa percepatan output ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi sekalipun belum tentu mampu menjamin bahwa hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu berperan sebagai kekuatan pendorong pemerataan kesejahteraan (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Paradigma pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan justru bertendensi memperparah disparitas, sebab perolehan hasil pembangunan cenderung terakumulasi pada segmen masyarakat berpendapatan tinggi serta kawasan yang secara ekonomi telah mengalami kemajuan lebih pesat (Amalia & Al., 2022). Realitas ini menggarisbawahi bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi belum tentu merepresentasikan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh strata masyarakat. Trajektori perekonomian Provinsi Jawa Timur sepanjang periode 2020 hingga 2024 memanifestasikan pola rehabilitasi pascapandemi yang berlangsung secara gradual.

Pada tahun 2020, aktivitas ekonomi nasional mengalami penyusutan sebesar 2,4 persen sebagai dampak langsung dari guncangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap berbagai sektor produksi dan konsumsi. Tekanan yang datang secara tiba-tiba dan meluas ini memaksa banyak pelaku usaha untuk mengurangi kapasitas produksi, bahkan sebagian terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya sama sekali. Kondisi tersebut pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara luas dan memperlambat roda perekonomian di hampir seluruh penjuru negeri. Tekanan yang begitu besar ini memaksa banyak pelaku ekonomi untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya, sehingga roda perekonomian melambat secara tajam dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menjadi salah satu titik tergelap dalam perjalanan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan mulai meredanya dampak pandemi, perekonomian berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,6 persen pada tahun 2021. Pemulihan ini mencerminkan kemampuan adaptasi pelaku ekonomi serta mulai berjalannya berbagai program stimulus yang digulirkan pemerintah untuk mendorong kebangkitan aktivitas ekonomi. Momentum pemulihan tersebut kemudian semakin menguat pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan yang cukup berarti hingga mencapai angka 5,3 persen.

Meskipun terjadi sedikit deselerasi pada tahun 2023 hingga 2024, laju pertumbuhan tetap terstabilisasi di kisaran 5 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Tren rehabilitasi tersebut mencerminkan resiliensi perekonomian Provinsi Jawa Timur yang relatif kokoh pascakrisis pandemi. Kendati demikian, stabilitas pertumbuhan yang terdokumentasi belum niscaya diiringi oleh ekualisasi pendapatan di seluruh kabupaten dan kota. Disparitas dalam struktur ekonomi antardaerah berpotensi mengakibatkan perolehan dari pertumbuhan hanya terabsorpsi oleh

wilayah-wilayah tertentu, sehingga ketimpangan pendapatan antarwilayah tetap merupakan problematika yang memerlukan atensi serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, belanja daerah oleh pemerintah daerah juga dapat berdampak pada distribusi pendapatan. Melalui penerapan kebijakan fiskal setempat, belanja daerah digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana serta layanan publik yang esensial dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk (Negara & Khoirunurrofik, 2021). Akan tetapi, ketimpangan dalam kemampuan fiskal serta fokus pembangunan antarwilayah bisa memicu ketimpangan dalam pengeluaran, yang dampaknya adalah manfaat pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang maju dan berpotensi memperlebar ketimpangan (Febrianto, 2017).

Selain belanja daerah, kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam membentuk pola ketimpangan pendapatan antarwilayah. Daerah dengan nilai IPM yang lebih tinggi pada umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan, sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah dengan IPM yang lebih rendah (Irawan et al., 2024). Perbedaan kapasitas sumber daya manusia inilah yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan pendapatan antara wilayah yang lebih maju dan wilayah yang masih tertinggal. Meski begitu, peningkatan IPM tidak serta-merta diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan secara langsung dan otomatis. Perbaikan kualitas sumber daya manusia baru dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pemerataan apabila diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di berbagai wilayah. Tanpa dukungan akses ekonomi yang terbuka secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan IPM berisiko hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau daerah tertentu saja, sehingga kesenjangan yang ada justru sulit untuk dipersempit.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh pendapatan tenaga kerja melalui kebijakan upah minimum. Upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak dan meningkatkan daya beli sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan (Putri & Hanifa, 2024). Namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu searah. Jika kenaikan upah minimum lebih banyak dinikmati pekerja sektor formal dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan sementara sektor informal tidak terjangkau, maka ketimpangan antarwilayah justru dapat meningkat. Di Provinsi Jawa Timur, perbedaan tingkat upah minimum antar kabupaten dan kota mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antardaerah, terutama jika tidak disertai dengan pemerataan kesempatan kerja (Utomo, 2021).

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perhatian akademis terhadap persoalan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada tingkat nasional dengan mengandalkan Indeks Gini sebagai alat ukur yang menggambarkan kesenjangan antar individu. Sementara itu, temuan

dari berbagai studi sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, serta upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan memperlihatkan hasil yang beragam dan belum mengerucut pada satu kesimpulan yang bulat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa hubungan antar variabel tersebut bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh ciri khas masing-masing wilayah yang dikaji.

Febrianto (2017) dalam studinya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2011 hingga 2015. Sejalan dengan itu, Putri dan Hanifa (2024) juga mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum turut berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah yang sama. Rachmawati, Lubis, dan Azzakiyyah (2025) dalam analisis data panel berskala nasional menemukan bahwa variabel ekonomi makro secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan regional yang diukur menggunakan Indeks Williamson.

Perbedaan temuan antar studi tersebut, dikombinasikan dengan masih sedikitnya kajian yang secara khusus menggunakan Indeks Williamson sebagai tolok ukur ketimpangan regional di Provinsi Jawa Timur, membentuk suatu celah akademis yang cukup berarti untuk diisi. Celah inilah yang menjadi alasan utama dilaksanakannya penelitian ini, yakni untuk menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan kondisi spasial secara nyata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan bagi pemahaman dan penanganan persoalan ketimpangan di tingkat daerah.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan Indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antarwilayah yang lebih mampu merepresentasikan disparitas spasial antarkabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga memperbarui periode analisis dengan menggunakan data panel seimbang tahun 2020 hingga 2024, sehingga dapat menangkap dinamika ketimpangan pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih merata.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kurva Kuznets (1955)

Teori Kurva Kuznets menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang membentuk pola U terbalik, di mana ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum akhirnya menurun pada tahap pembangunan yang lebih matang (Moffat, 2025). Menurut Kuznets (1955) dalam Madsen dan Strulik (2025), peningkatan ketimpangan pada tahap awal terjadi akibat perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian berpendapatan rendah ke sektor

industri dan jasa yang memiliki produktivitas serta tingkat upah lebih tinggi. Perbedaan produktivitas dan pendapatan antarsektor tersebut menjadi faktor yang mendorong meningkatnya ketimpangan selama proses transformasi struktural (Ravallion & Chen, 2021)

Teori ini juga menjelaskan adanya titik balik ketika ketimpangan mulai menurun seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin meratanya akses terhadap kesempatan kerja serta hasil pembangunan. Relevansi teori ini didukung oleh penelitian Hermawan dan Taher yang menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2004-2023, sehingga memperkuat validitas Teori Kuznets dalam konteks Indonesia (Hermawan & Taher, 2025).

Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Williamson

Ketimpangan pendapatan antarwilayah merupakan kondisi ketika hasil pembangunan dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga menciptakan perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah (Wahyuni & Andriyani, 2022). Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga mencerminkan belum meratanya distribusi hasil pembangunan antarwilayah (Priambodo, 2025).

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan antarwilayah adalah Indeks Williamson, yaitu indeks yang membandingkan PDRB per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk pada setiap daerah sehingga mampu menggambarkan tingkat kesenjangan pembangunan secara lebih representatif (Sjafrizal, 2008). Nilai Indeks Williamson berada pada rentang 0–1, di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin besar, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukkan pemerataan pembangunan yang lebih baik (Leasiwal et al., 2022).

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Menurut Teori Kurva Kuznets, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena manfaat pembangunan masih terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu. Seiring dengan semakin matangnya pembangunan, manfaat pertumbuhan diharapkan menyebar lebih merata sehingga ketimpangan dapat menurun (Madsen & Strulik, 2025). Selain itu, Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow-Swan menjelaskan bahwa perbedaan akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi antarwilayah menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memperlebar ketimpangan pendapatan (Tarigan, 2024). Penelitian Afif (2022), Putri dan Hanifa (2024) serta (Mulia & Rosalia, 2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan PDRB belum tentu mencerminkan pemerataan hasil pembangunan.

Belanja Daerah dan Ketimpangan Pendapatan

Belanja daerah dalam penelitian ini merupakan realisasi pengeluaran APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang mencerminkan penggunaan sumber daya publik untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam Teori Kebijakan Fiskal Keynesian, belanja daerah merupakan komponen permintaan agregat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme *multiplier effect* (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat, 2023).

Belanja daerah yang dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah (Wahyudi, 2023). Namun, penelitian Febrianto menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan anggaran belum tentu diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan (Febrianto, 2017). Efektivitas belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada ketepatan alokasi dan pemanfaatan anggaran publik (Kusmawati et al., 2025).

Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga banyak digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan manusia antarwilayah (UNDP (United Nations Development Programme), 2022). Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain dan secara bersama

Perbedaan capaian IPM antarwilayah dapat menyebabkan kesenjangan produktivitas dan akses terhadap peluang ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi ketimpangan pendapatan (Ersad et al., 2022). Penelitian Meidiyan, Asrini dan Irmanelly (2025) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, manfaat tersebut bergantung pada pemerataan akses terhadap kesempatan kerja dan peluang ekonomi (UNDP (United Nations Development Programme), 2020). Temuan (Balqis & Nurhadi, 2025) menunjukkan bahwa IPM juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Salsabila et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum dalam penelitian ini diukur berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di setiap wilayah selama periode penelitian. Kebijakan upah minimum bertujuan melindungi pekerja melalui pemberian penghasilan yang layak serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan tenaga kerja (Suprihanto & Putri, 2021). Penelitian (Salsabila et al., 2025) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan Balqis dan Nurhadi (2025) menemukan bahwa upah

minimum berkaitan dengan tingkat kemiskinan, meskipun pengaruhnya tidak selalu signifikan pada setiap wilayah.

Dalam Teori Pasar Tenaga Kerja Keynesian, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor formal, tetapi belum tentu diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, terutama di sektor informal (Cahyantini & al., 2024). Perbedaan struktur ekonomi antarwilayah menyebabkan dampak kebijakan upah minimum tidak selalu sama, sehingga apabila kenaikan upah lebih banyak dinikmati oleh daerah industri dibandingkan daerah agraris, ketimpangan pendapatan antarwilayah berpotensi meningkat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel, yaitu gabungan data cross-section dan time series yang memungkinkan analisis perbedaan antarwilayah sekaligus perubahan dari waktu ke waktu (Ghozali & Ratmono, 2018). Penelitian dilakukan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024, sehingga diperoleh 190 observasi.

Tabel 1. Sumber Data Variabel

Variabel Penelitian	Simbol	Satuan	Sumber Data
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Williamson)	IW	Indeks (0-1)	BPS Provinsi Jawa Timur (PDRB per kapita ADHK & Jumlah Penduduk Kab/Kota) diolah peneliti
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen (%)	BPS Kab/Kota Provinsi Jawa Timur (2020-2024)
Belanja Daerah	BD	Rupiah (Rp)	DJPK Kemenkeu/ APBD Kab/Kota, Realisasi Belanja Daerah
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks	BPS Provinsi Jawa Timur
Upah Minimum Kab/Kota	UMK	Rupiah (Rp)	BPS Provinsi Jawa Timur

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Williamson, sedangkan variabel independennya meliputi pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum (lihat Tabel 1). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait.

Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB perkapita daerah i

$\bar{y}$ = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, belanja daerah yang diukur berdasarkan realisasi APBD, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data Badan Pusat Statistik, serta upah minimum yang diukur menggunakan nilai UMK masing-masing kabupaten/kota. Keempat variabel tersebut dipilih karena secara teoritis berkaitan dengan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= Ketimpangan Pendapatan
α	= Konstanta
$\beta_1 X_{1it}$	= Pertumbuhan Ekonomi
$\beta_2 X_{2it}$	= Belanja Daerah
$\beta_3 X_{3it}$	= Indeks Pembangunan Manusia
$\beta_4 X_{4it}$	= Upah Minimum
ϵ_{it}	= Error
t	= Waktu
i	= Wilayah

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, BPS kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKN) Kementerian Keuangan, serta dokumen APBD yang telah dipublikasikan. Data meliputi PDRB per kapita, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja daerah, dan upah minimum. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Penelitian ini menganalisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan Indeks Williamson selama periode 2020-2024. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson mengalami peningkatan dari 0,977 pada tahun 2020 menjadi 1,018 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antarwilayah cenderung meningkat selama periode penelitian..

Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks Williamson

Tahun	Indeks Williamson
2020	0,977
2021	0,985
2022	1,002
2023	1,013
2024	1,018

Berdasarkan Tabel 2, nilai Indeks Williamson di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024, yaitu dari 0,977 menjadi 1,018.

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota cenderung semakin melebar dari tahun ke tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan di Provinsi Jawa Timur masih belum merata, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum. Selama periode penelitian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola pemulihan setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Meskipun sebagian besar daerah kembali mencatat pertumbuhan positif sejak 2021, kecepatan pemulihan berbeda antarwilayah. Kabupaten Tuban mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88% pada tahun 2022, sedangkan Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,16% pada tahun yang sama.

Belanja daerah secara umum meningkat selama 2020-2024, namun masih menunjukkan disparitas kapasitas fiskal yang cukup besar antarwilayah. Pada tahun 2024, belanja daerah tertinggi tercatat di Kota Surabaya, sedangkan beberapa daerah seperti Kota Batu dan Kota Blitar memiliki nilai belanja yang jauh lebih rendah. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang konsisten, tetapi kesenjangan antardaerah masih terlihat. Kota Surabaya dan Kota Malang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2024, sedangkan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan masih mencatat nilai IPM terendah.

Upah minimum kabupaten/kota juga menunjukkan tren meningkat setiap tahun, namun terdapat perbedaan yang cukup besar antara wilayah industri dan wilayah agraris. Pada tahun 2024, Kota Surabaya memiliki UMK tertinggi, sedangkan Kabupaten Situbondo, Sampang, dan Pacitan termasuk daerah dengan UMK terendah.

Pemilihan dan Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap pengujian. Kedua pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa model yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik data yang tersedia, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat lebih diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara statistik. Tanpa melalui tahapan seleksi model yang tepat, kesimpulan yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan hubungan antarvariabel yang sesungguhnya.

Tabel 3. Hasil Analisis Persamaan Regresi-Model FEM

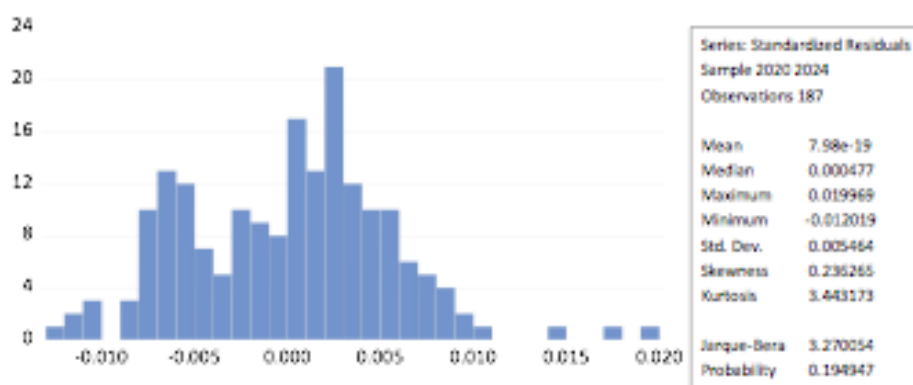
Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,796437	0,009909	80,37404	0,0000
Pertumbuhan Ekonomi	0,002119	0,000176	12,01478	0,0000
Belanja Daerah	4,64E-14	1,96E-14	2,371126	0,0190
IPM	6,36E-07	6,91E-07	0,920059	0,3591
Upah Minimum	7,14E-07	4,32E-08	16,52660	0,0000
R-Squared	0,889441			
Adjusted R-Squared	0,858180			
F-statistik	28,45174			
Prob.	0,000000			

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman sama-sama menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($<0,05$), sehingga Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model

yang paling sesuai dibandingkan Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan, dan analisis regresi selanjutnya menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik. Adapun hasilnya sebagaimana Tabel 3.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi dilakukan, model terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh asumsi klasik telah terpenuhi sehingga model dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis regresi. Uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera pada Gambar 2 menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,194 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antarvariabel independen. Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi berada di bawah 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis regresi.



Gambar 2. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1,000000	0,034579	-0,066105	0,207494
X2	0,034579	1,000000	-0,007846	0,516627
X3	-0,066105	-0,007846	1,000000	-0,079181
X4	0,207494	0,516627	-0,079181	1,000000

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui pengamatan terhadap pola sebaran residual pada grafik residual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual tersebar secara acak dan berada dalam rentang yang wajar, sehingga model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis regresi.

Hasil Uji Parsial, Uji Simultan, dan Koefisien Determinasi

Hasil Uji t berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan upah minimum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0000, 0,0190, dan 0,0000 ($<0,05$). Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai

probabilitas sebesar 0,3591 ($>0,05$). Di antara seluruh variabel, upah minimum merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji F menghasilkan nilai F-statistik sebesar 28,452 dengan probabilitas 0,000000 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,858180 menunjukkan bahwa 85,8% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, dan upah minimum, sedangkan 14,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antarkabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur sepanjang periode 2020 hingga 2024. Arah hubungan yang positif ini bermakna bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung beriringan dengan semakin melebarnya jurang pendapatan antarwilayah. Pola hubungan semacam ini mengisyaratkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Jawa Timur belum menyebar secara proporsional ke seluruh kabupaten dan kota. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat aktivitas ekonomi di Jawa Timur masih terpusat di sejumlah wilayah yang memiliki fondasi industri dan infrastruktur lebih matang, seperti kawasan Surabaya dan daerah sekitarnya. Sementara itu, daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki, cenderung tidak memperoleh manfaat pertumbuhan secara setara. Ketidakmerataan dalam distribusi hasil pertumbuhan inilah yang pada akhirnya mendorong ketimpangan pendapatan antarwilayah terus melebar dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut sejalan dengan pola yang terekam pada nilai Indeks Williamson, yang terus mengalami kenaikan dari angka 0,977 pada tahun 2020 menjadi 1,018 pada tahun 2024. Kenaikan indeks ini memperkuat gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama periode tersebut lebih banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah lebih maju secara ekonomi. Wilayah dengan basis industri dan infrastruktur yang lebih kuat cenderung menyerap lebih banyak manfaat dari pertumbuhan, sementara daerah-daerah yang tertinggal belum mampu mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu singkat. Dalam konteks Jawa Timur, temuan ini menjadi sinyal penting bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan antarwilayah.

Temuan ini sejalan dengan Teori Kurva Kuznets, yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat transformasi dari sektor tradisional ke sektor modern yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, sebelum pada akhirnya menurun seiring pemerataan pembangunan (Madsen & Strulik, 2025). Kondisi ini juga diperkuat oleh Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow-Swan, yang menekankan bahwa perbedaan akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi antarwilayah menjadi penyebab utama variasi laju pertumbuhan. Ketika konvergensi antarwilayah belum tercapai, daerah dengan modal dan infrastruktur yang lebih unggul akan berkembang lebih cepat dan memperlebar kesenjangan (Tarigan, 2024). Hal ini tercermin dari perbedaan signifikan dalam laju pertumbuhan antardaerah, di mana Kabupaten Tuban mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen pada tahun 2022, sementara Kabupaten Bojonegoro mencatat pertumbuhan negatif sebesar 6,16 persen pada tahun yang sama.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Afif (Afif, 2022) yang mendapati adanya pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Putri dan Hanifa (2024) yang menemukan pola serupa di Provinsi Jawa Timur. Kesamaan pola ini memberi gambaran bahwa di sejumlah wilayah, pertumbuhan ekonomi justru cenderung memperparah kesenjangan antar kelompok pendapatan, alih-alih mempersempitnya. Sementara itu, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyudi (2023) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat nasional. Perbedaan arah temuan ini mengisyaratkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak berlaku seragam di semua wilayah. Perbedaan tersebut menggarisbawahi bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan sangat dipengaruhi oleh konteks masing-masing daerah, termasuk struktur ekonomi serta karakteristik sosial yang berlaku di sana.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang dibuktikan melalui nilai probabilitas sebesar 0,0190. Arah hubungan yang bersifat positif ini mengisyaratkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah daerah justru cenderung diikuti oleh semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antar wilayah. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah daerah tampaknya belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah, dan masih cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja. Akibatnya, kabupaten atau kota yang mendapatkan porsi belanja lebih besar akan terus berkembang lebih pesat, sementara daerah lain tertinggal, sehingga jurang ketimpangan antar wilayah semakin melebar dari waktu ke waktu.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Kurva Kuznets dan Teori Kebijakan Fiskal Keynesian. Dari perspektif Kuznets, pengeluaran pemerintah daerah yang terdistribusi secara tidak merata dapat memperkuat konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu. Dalam kerangka Keynesian, ketimpangan dalam kapasitas fiskal dan efektivitas

pengelolaan anggaran antarwilayah dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah daerah berpotensi memperlebar ketimpangan jika tidak disertai distribusi yang adil (DJPBp, 2023). Disparitas nominal belanja antardaerah sangat jelas terlihat, di mana pada tahun 2024 Kota Surabaya membelanjakan Rp999,8 miliar sementara Kota Batu hanya Rp20,2 miliar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Afif (2022) yang mendapati bahwa pengeluaran di tingkat regional tidak selalu mampu menekan ketimpangan secara efektif, khususnya ketika distribusi anggaran belum merata di berbagai wilayah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan belum tentu berbanding lurus dengan dampak pemerataan yang dihasilkan. Meski demikian, temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian Wahyudi (2023), yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru membawa pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Perbedaan arah temuan ini mengisyaratkan bahwa hasil kajian mengenai belanja daerah dan ketimpangan sangat bergantung pada konteks dan karakteristik wilayah yang diteliti. Mengacu pada konteks Provinsi Jawa Timur, perbedaan tersebut menggarisbawahi bahwa komposisi belanja dan seberapa merata distribusinya antardaerah merupakan faktor kunci yang menentukan apakah belanja daerah dapat berperan sebagai instrumen penurun ketimpangan. Belanja yang besar namun terkonsentrasi di wilayah tertentu cenderung kurang efektif dibandingkan belanja yang lebih merata meskipun jumlahnya lebih kecil.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

IPM memiliki hubungan yang searah namun tidak terbukti signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan, sebagaimana tercermin dari nilai probabilitas sebesar 0,3591. Meskipun IPM di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang periode penelitian, peningkatan tersebut belum terbukti membawa perubahan yang berarti terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk mendorong pemerataan pendapatan antar daerah secara nyata.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Kurva Kuznets dan Teori Pembangunan Manusia UNDP. Dari perspektif Kuznets, kondisi ini mencerminkan tahap awal pembangunan di mana manfaat pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu sehingga ketimpangan belum menurun secara nyata (Madsen dan Strulik, 2025). Sementara itu, dalam kerangka pembangunan manusia UNDP, peningkatan IPM yang tidak disertai dengan akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan lapangan kerja tidak akan berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (UNDP, 2020). Kesenjangan IPM yang masih lebar antara Kota Surabaya dengan nilai 84,14 dan Kabupaten Sampang dengan nilai 64,65 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa manfaat pembangunan manusia belum dinikmati secara merata.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Meidiyan, Asrini dan Irmanelly (2025) yang menemukan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, maupun dengan Yoertiara dan Feriyanto (2022) yang menemukan pola serupa pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Perbedaan arah temuan ini menunjukkan bahwa konteks wilayah memegang peran penting dalam menentukan seberapa besar dampak IPM terhadap kesenjangan ekonomi. Meski IPM di Jawa Timur menunjukkan tren yang terus membaik dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tampaknya belum cukup kuat untuk menekan ketimpangan pendapatan secara berarti. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah distribusi manfaat pembangunan yang masih belum merata antarwilayah di dalam provinsi.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum terbukti memiliki pengaruh yang nyata dan searah terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum cenderung sejalan dengan semakin melebarnya jurang pendapatan antar wilayah. Temuan ini seolah bertolak belakang dengan tujuan awal kebijakan upah minimum, yang pada dasarnya dirancang untuk melindungi pekerja serta mendorong pemerataan taraf kesejahteraan masyarakat. Situasi paradoks ini muncul karena penetapan upah minimum yang tidak seragam antar kabupaten dan kota pada akhirnya memperlebar jarak antara wilayah berupah tinggi dan wilayah berupah rendah. Kawasan yang menetapkan upah minimum lebih tinggi umumnya merupakan daerah industri atau perkotaan yang sudah lebih maju secara ekonomi, sehingga perbedaan tingkat perkembangan antar wilayah terus bertahan bahkan semakin menguat dari waktu ke waktu.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan oleh Teori Kurva Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat akibat konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu (Madsen dan Strulik, 2025). Dari perspektif Teori Pasar Tenaga Kerja Keynesian, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor formal, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan peluang kerja di sektor informal. Ketika permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja tidak terdistribusi merata di seluruh wilayah, kebijakan upah minimum berpotensi memperlebar ketimpangan antara wilayah industri dan wilayah yang masih terbelakang (Cahyantini et al., 2024). Kesenjangan upah minimum yang nyata, di mana Kota Surabaya menetapkan Rp4.725.479 sementara Kabupaten Pacitan hanya Rp2.199.337 pada tahun 2024, mencerminkan kondisi ini.

Temuan ini selaras dengan hasil studi Putri dan Hanifa (2024) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan upah minimum terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Dalam studi tersebut, kenaikan upah cenderung lebih banyak dirasakan oleh pekerja di sektor formal, sehingga justru memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum belum tentu berdampak merata bagi seluruh lapisan tenaga kerja. Meski demikian, temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian Meidiyan,

Asrini, dan Irmanelly (2025) di Provinsi Jambi yang justru menemukan pengaruh negatif upah minimum terhadap ketimpangan. Perbedaan arah pengaruh ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan kebijakan upah minimum sangat dipengaruhi oleh susunan perekonomian dan sebaran tenaga kerja yang berbeda di tiap wilayah.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas pemerataan hasil pembangunan di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum yang meningkat belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan apabila manfaatnya masih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tenaga kerja tertentu. Belanja daerah perlu dialokasikan secara lebih merata, sedangkan peningkatan pembangunan manusia perlu disertai dengan perluasan akses terhadap peluang ekonomi agar keduanya lebih efektif dalam mempersempit kesenjangan pendapatan antarkabupaten dan kota

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari proses penelitian dan analisis mendalam mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum memengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2020 hingga 2024, sejumlah simpulan penting dapat dirumuskan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah. Kenaikan pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan seiring dengan semakin melebarnya kesenjangan antar daerah, yang mencerminkan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut belum tersebar secara proporsional ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kedua, belanja daerah juga terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang terus meningkat belum mampu menjadi instrumen pemerataan yang efektif, sebab manfaatnya masih cenderung terserap lebih besar oleh daerah-daerah yang sudah memiliki kapasitas fiskal lebih kuat.

Ketiga, IPM belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam periode yang diteliti. Meskipun nilai IPM menunjukkan peningkatan di berbagai daerah, perbaikan tersebut belum cukup kuat untuk mengubah pola ketimpangan yang ada secara berarti. Distribusi manfaat pembangunan manusia yang masih belum merata antarwilayah diduga menjadi salah satu faktor yang meredam pengaruh IPM terhadap kesenjangan pendapatan. Keempat, upah minimum terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kenaikan upah minimum cenderung diikuti oleh meluasnya kesenjangan, yang mencerminkan bahwa kebijakan ini belum menghasilkan dampak yang seragam di seluruh wilayah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas ketersediaan data resmi yang menjadi tulang punggung analisis dalam penelitian ini. Data yang disediakan oleh kedua lembaga tersebut memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sehingga turut memperkuat kesahihan temuan yang dihasilkan. Keterbukaan akses terhadap data publik semacam ini sangat mendukung kemajuan penelitian di bidang ekonomi regional.

Referensi

- Afif, D. H. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(3), 176–186. <https://doi.org/10.14710/djoe.34841>
- Amalia, F., & Al., E. (2022). *Ekonomi Pembangunan* (R. Kusumaningrum (ed.); 1st ed.). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Aprilianti, V., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>
- Asy'ariati, F. A., Wahyudi, H., Murwiati, A., Nirmala, JTiara, & Taher, A. R. Y. (2022). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.23>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024 tumbuh 4,93 Persen Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2024 tumbuh 5,03 Persen (Y-on-Y) Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2024 tumbuh -0,77 Persen (Q-to-Q)*. Berita Resmi Statistik. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1479/ekonomi-jawa-timur-tahun-2024-tumbuh-4-93-persenekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-ekonomi-jawa-timur-triwulan-iv-2024-tumbuh--0-77-persen--q-to-q-.html>
- Balqis, Z. N. P., & Nurhadi, B. (2025). Dampak jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan: Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 61–72. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1366>
- Cahyantini, A., & al., et. (2024). *Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (F. S. Schouten (ed.)). CV. Gita Lentera.
- Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshirif, R., & Piketty, T. (2026). *Top 10% national income share*. World Inequality Lab.
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>

- Febrianto, R. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3572>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2018). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, A. U., & Taher, A. R. Y. (2025). Analisis Relevansi Hipotesis Kuznet Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2004-2023. *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)*, 3(3), 577–590. <https://doi.org/10.23960/efebe.v3i3.263>
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. (2024). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *EkuiInomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 623–633. <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat. (2023). *Kajian Fiskal Regional (KFR) Papua Barat Tahun 2022*. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat.
- Koponen, S., & Kouvo, A. (2024). The Mediating Role of Perception of Society Between Income Inequality and Life Satisfaction. Insights from the European Social Survey. *Applied Research in Quality of Life*, 19(5), 2847–2869. <https://doi.org/10.1007/s11482-024-10361-6>
- Kusmawati, D. Z., Atsnaa, N. T., Masrurroh, U., Astuti, P., Indrawati, L. R., & Rahmah, S. (2025). Kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 653–665. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2016>
- Leasiwal, T. C., Payapo, R. W., Oppier, H., & Setya, D. (2022). Analysis of Income Disparities between Regions in the Western Region of Indonesia and the Eastern Region of Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 638–656. <https://doi.org/10.54783/ij soc.v4i4.612>
- Madsen, J., & Strulik, H. (2025). Taking Kuznets Seriously. *Journal of Economic Growth*, 1–30. <https://doi.org/10.1007/s10887-025-09262-6>
- Meidiyan, H., Asrini, & Irmanelly. (2025). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 623–636. <https://doi.org/10.63822/0pa9km04>
- Moffat, M. (2025). *Essential Economics Terms: Kuznets Curve*. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/kuznets-curve-in-economics-1146122>
- Mulia, F. S., & Rosalia, A. C. T. (2025). Analisis Sektor Unggulan dan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Brebes. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 261–276. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1699>
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia.

- Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Priambodo, A. (2025). Inequality and poverty intensity as drivers of deprivation in Eastern Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 783–800. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2385>
- Putri, R. N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4, 105–114. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65963>
- Rachmawati, L. N., Lubis, F. R., & Azzakiyyah, N. A. (2025). Regional income disparities in Indonesia: Insights from the Williamson index and panel data analysis. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2), 264–271. <https://doi.org/10.12928/optimum.v15i2.12953>
- Ravallion, M., & Chen, S. (2021). Is That Really A Kuznets Curve? Turning Points For Income Inequality In China. *Nber Working Paper Series*, 20, 749–776. <https://doi.org/10.1007/s10888-022-09541-x>
- S. Dai, S. I., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh RIs, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 535–544. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.950>
- Salsabila, A. H., Rahmatillah, A. E., Arwansa, D., Mukharohmah, M. S., & Septiani, Y. (2025). Dampak Upah Minimum, IPM, Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran: Analisis Data Panel Lima Kabupaten Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 245–260. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1864>
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media.
- Suprihanto, J., & Putri, L. P. (2021). *Manajemen Sumberdaya Manusia* (Dewi (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Tarigan, R. (2024). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2020). Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. In *UNDP (United Nations Development Programme)*. United Nations Development Programme.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2022). Human Development Report 2021-2022 Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. In *UNDP (United Nations Development Programme)*. United Nations Development Programme.
- Utomo, A. P. (2021). Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Kota Kendari Tahun 2010–2018. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(2), 144–155. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i2.3737>
- Wahyudi. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh.
Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 5(1), 1–9.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7919>

Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100.
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>